

Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara

Merwy Rande Layuk

Abstrak

RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa sedangkan berdasarkan keputusan presiden RI No 49 Tahun 2001 tentang penataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.

Kepemimpinan Ketua RT dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan dalam kemasyarakatan sangatlah diperlukan supaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama, peran Ketua RT sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka mempercepat akses pelayanan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan kewargaan.

Kata Kunci : peran, ketua RT di desa sebuntal.

Pendahuluan

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain disebutkan bahwa Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan. Sedangkan Rukun Warga disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.

Pada RT/RW terdapat aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk menertibkan kehidupan bersama di lingkungan RT/RW. Dalam aturan tersebut biasanya memuat kewajiban-kewajiban warga menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Aturan-aturan tertulis yang terdapat di RT/RW antara lain: setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK), warga baru (pendatang) wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga lama yang pindah wajib melaporkan

diri kepada Ketua RT, warga yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), tamu yang menginap wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, setiap kepala keluarga wajib membayar iuran yang telah disepakati (iuran RT, iuran RW, iuran sampah, pembangunan, dan sebagainya), setiap warga wajib menjaga kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.

Di samping itu ada pula aturan yang tidak tertulis atau biasa disebut norma. Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain norma adat/kebiasaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Misalnya bila ada tetangga yang sakit warga lain menengoknya, tradisi melayat bila ada warga yang meninggal dunia, serta setiap warga wajib datang pada pertemuan RT. Apabila anggota masyarakat melanggar salah satu norma tersebut, maka sanksinya adalah akan dikucilkan atau menjadi bahan pembicaraan orang lain.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada masa pemerintahan orde baru pernah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983. Selanjutnya pada masa reformasi dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, maka Permendagri Nomor 7 Tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi, keberadaan RT/RW sangat diperlukan dalam semua kegiatan kemasyarakatan dan merupakan ujung tombak pelayanan pada warga masyarakat karena kedekatannya dengan para konstituen. Fungsi RT/RW di samping melakukan fungsi-fungsi yang sifatnya pemberian pelayanan pada warga, juga melakukan fungsi koordinasi dan fungsi fasilitasi pada kegiatan tertentu, misal pada acara peringatan HUT RI setiap tanggal 17 Agustus.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat pasal 1 point ke 10 Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa sedangkan berdasarkan keputusan presiden RI No 49 Tahun 2001 tentang penataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan. Rukun tetangga dan rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di wilayah kelurahan yang keberadaannya diakui oleh pemerintah kota. Rukun

Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warga, memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di kelurahan.

Kecamatan Marangkayu dalam mensosialisasikan kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan secara luas, belum adanya dukungan dan pihak diluar masyarakat (Pemerintah Kabupaten, LSM, pihak Swasla dan Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Perencanaan di Desa Sebuntal baik yang ditujukan kepada pihak Pemerintah Desa Sebuntal maupun masyarakatnya dan masih ada kebijakan Pemerintah Daerah Kecamatan Marangkayu dalam hal ini petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang mendukung dominasi Kepala Desa dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa. Berbagai faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi masyarakat tersebut sebagian besar merupakan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Desa Sebuntal, Masyarakat Desa Sebuntal, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan LSM untuk memperbaiki pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa di Desa Sebuntal agar dapat lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan lebih memberdayakan masyarakat sehingga dapat memperbaiki jenjang partisipasi masyarakat dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa RT (Rukun Tetangga) berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek, baik dari segi pembangunan dan lain-lain dengan melihat tugas pokok dan fungsi dari Rukun Tetangga diatas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul dan mengadakan penelitian mengenai peran Rukun Tetangga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dari segi pembangunan desa.

Kerangka Dasar Teori

Tugas Pokok dan Fungsi Rukun Tetangga

Rukun Tetangga (RT) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Rukun Tetangga (RT) yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan

yang ada di wilayah kelurahan atau desa. Namun didalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Desa Organisasi Rukun Tetangga tidak disebut dan tidak termasuk dalam sistem pemerintahan, realita lembaga Rukun Tetangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.

Dari penjelasan mengenai maksud, tujuan serta tugas pokok dan fungsi dari Rukun Tetangga diatas dapat disimpulkan bahwa Rukun Tetangga merupakan suatu organisasi yang tidak termasuk dalam sistem pemerintahan yang diangkat melalui musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga dengan adanya Rukun Tetangga tersebut diharapkan agar Rukun Tetangga dapat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan itu sendiri, baik dari segi pembangunan dan lain-lain.

Tugas Pokok Ketua RT adalah :

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- b. Memelihara kerukunan hidup warga;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok Ketua RT memiliki fungsi :

- a. Pengkoordinasian antar warga;
- b. Pelaksanaan dan menjembatani hubungan antara anggota masyarakat dengan pemerintah;
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa, pemerintah pusat beberapa kali telah mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya Undang-Undang No, 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Kemampuan untuk berkomunikasi / komunikasi antarpersonal adalah pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan umpan balik yang langsung. Jenis komunikasi tersebut dianggap paling efektif dalam upaya membentuk sikap, pendapat atau perilaku seseorang berhubung sifatnya yang dialogis. Perilaku dialogis tersebut ditunjukkan melalui komunikasi lisan dalam percakapan yang menampilkan arus balik yang langsung. Jadi komunikator mengetahui tanggapan komunikan pada saat itu juga, dan komunikator mengetahui dengan pasti apakah pesan yang dikirimkan itu diterima atau ditolak, berdampak positif atau negatif.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi antarpersonal adalah pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan dengan efek dan umpan balik langsung untuk mengetahui apakah pesan yang dikirimkan itu berdampak positif atau negatif. Dialog adalah bentuk komunikasi antarpribadi yang menunjukkan adanya interaksi. Mereka yang terlibat komunikasi bentuk ini berfungsi ganda, masing-masing menjadi pembicara dan pendengar secara bergantian. Dalam proses komunikasi dialogis nampak adanya upaya dari para pelaku komunikasi untuk terjadinya pengertian bersama (*mutual understanding*) dan empati. .

a. Pendekatan Langsung

Pendekatan merupakan suatu proses, dimana sebuah pendekatan adalah keakraban satu dengan yang lain dan mencapai suatu tujuan yang di ingin kan. Proses itu secara keseluruhan berlangsung sebagai sistem yang didalamnya terdapat beberapa unsur atau elemen yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan.

Dengan adanya pendekatan yang meliputi perencanaan pada dasarnya merupakan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang. Dalam perkiraan ini perlu dirumuskan tujuannya secara khusus dalam arti terperinci dan operasional, agar dapat diukur tingkat pencapaiannya setelah kegiatan dilaksanakan.

Berkenaan dengan perkiraan waktu ini perlu juga diperhitungkan lamanya waktu yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan untuk setiap masyarakat yang ada di Kecamatan Marang Kayu.

b. Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung yang dilakukan oleh Ketua RT dalam hal ini adalah pendekatan yang dilaksanakan secara tidak langsung mengadakan pemantauan melalui laporan warga untuk melihat dan menilai sejauhmana kegiatan masyarakat Marang Kayu dijalankan dan jika terdapat kekurangan akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran guna lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

2. **Motivasi Diri dan Dorongan Berprestasi** yaitu Seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif dan efisien. Motivasi diri (*self motivation*), merupakan skema spiritual seseorang yang melekat dalam kepribadiannya, sehingga keteguhan dan keyakinan terhadap tujuan dapat senantiasa melandasi aktivitasnya setiap saat. Motivasi diri ini kemudian mendorong seseorang untuk terus melakukan mereproduksi keberhasilan agar dapat menggerakkan warganya agar melakukan hal yang sama. Intinya motivasi serta dorongan untuk terus berprestasi ini merupakan pemantik situasi dari yang sebelumnya statis menjadi aktif bergerak dalam mencapai keinginan bersama.
3. **Akuntabilitas** merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.
Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standard pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut.
4. **Demokratis Partisipatif** dimana Kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Dibawah kepemimpinan demokratis

bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri (Rivai 2006 : 61). Menurut Robbins dan Coulter (2002:223) kepemimpinan demokratis mendeskripsikan pemimpin yang cenderung mengikutsertakan karyawan dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan kekuasaan, mendorong partisipasi karyawan dalam menentukan bagaimana metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai, dan memandang umpan balik sebagai suatu kesempatan untuk melatih karyawan.

5. **Keterbukaan** yaitu menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara terbuka dan transparan, artinya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah jelas tidak sembunyi-sembunyi dan rahasia melainkan perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus diketahui publik serta rakyat berhak atas informasi yang faktual mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai

Fungsi Kepemimpinan

Adapun fungsi dari pada kepemimpinan adalah: Sebagai pemandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi dan membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik memberikan supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.

Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara

Sesuai dengan data hasil penelitian dalam penyajian data dan indikator tentang pendekatan RT yang terdapat pada bab sebelumnya akan penulis bahas sebagai berikut:

Kemampuan Berkomunikasi

Kemampuan Berkomunikasi yaitu kemampuan dari ketua Rukun Tetangga dalam berkomunikasi/berbicara kepada warganya agar warganya dapat mendengarkan apa yang menjadi keinginannya. Ketua RT dapat memberikan motivasi dan dorongan bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kerukunan umat beragama. Adapun bentuk penyampaian ketua RT tersebut adalah dengan cara berdialog dengan warga setempat dengan memakai pendekatan tidak langsung.

Kepemimpinan Ketua RT dalam mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan dalam kemasyarakatan sangatlah diperlukan supaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama. Ketua RT dalam hal ini memberikan masukan serta memberikan jalan keluar yang terbaik dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini Ketua RT memiliki visi dan misi yang perlu dilakukan dan diharapkan adanya dukungan serta partisipasi masyarakat dalam mendukung dan menjalankan program-program kerja yang telah disusun.

Berkomunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Komunikasi banyak bentuknya, salah satu diantaranya adalah dengan komunikasi verbal. Pada kenyataannya komunikasi verbal lebih sering digunakan dari pada komunikasi non verbal. Komunikasi verbal merupakan karakteristik khusus dari manusia. Sebab tidak ada makhluk yang bisa bermacam-macam arti melalui kata-kata. Kata-kata dapat digunakan individu untuk menyatakan ide yang beragam serta komprehensif dan tepat. Kata-kata memungkinkan menyatakan perasaan yang dapat di baca orang lain untuk waktu yang lama.

Komunikasi verbal dibedakan menjadi dua macam :

1. Komunikasi lisan yang merupakan sebagai suatu proses dimana seorang pembicara berinteraksi secara lisan dengan pendengar untuk mempengaruhi tingkah laku penerima.
2. Komunikasi tulisan merupakan suatu proses di mana seseorang menyampaikan pesan dalam bentuk yang dituliskan pada kertas atau pada tempat yang bisa di baca.

Motivasi dan Dorongan Berprestasi

Motivasi dan Dorongan Berprestasi yaitu seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif dan efisien. Dan yang didasari atas motivasi diri dalam bentuk kinerja dari ketua RT itu sendiri dalam mendorong masyarakat misalnya Memberikan Motivasi kepada masyarakat.

Dari uraian di atas dapat di lihat peran Ketua RT dalam memfasilitasi pembuatan KTP, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang diharapkan dalam hal ini mempertimbangkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Ketua Rukun Tetangga (RT) sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka mempercepat akses pelayanan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan kewargaan di wilayah RW dan RT tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada RW/RT dalam karakteristik wilayah tersebut, akses masyarakat memperoleh kemudahan pelayanan akan sulit

terpenuhi. Akibatnya warga yang akan mengurus berbagai kepentingan akan langsung berhubungan dengan kepala lingkungan atau langsung ke kelurahan. Namun kelemahannya dari segi kelembagaan lingkungan yang dikepalai seorang kepala lingkungan, pada kenyataannya di lapangan ternyata seorang kepala lingkungan kurang memiliki peran signifikan dalam pembangunan kemasyarakatan di wilayahnya.

Akhirnya, karena keberadaan Ketua RT/RW sangat penting dan memiliki kontribusi yang sangat nyata dalam mensukseskan berbagai program pemerintah, sudah saatnya pemerintah membuat peraturan yang dapat "menghidupkan kembali" lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW agar berjalan sesuai dengan dinamika sosial yang ada. Dalam arti, perlu disusun aturan terkait RT/RW yang meliputi teknis operasional maupun dari segi hukum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat.

Tanpa adanya pengantar Ketua RT/RW warga tidak akan bisa memperoleh pelayanan serta mengurus surat yang diperlukan seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) baik di Kelurahan maupun instansi lainnya. Berdasarkan fungsinya, keberadaan Ketua RT/RW harus bisa mengkoordinir warga di lingkungannya, menjembatani hubungan antar warga serta menangani permasalahan yang dihadapi dalam hubungan tersebut, dan dapat menjadi contoh yang baik bagi warganya misal dalam kegiatan kerja bakti dimana pengurus Ketua RT/RW turun langsung dan mengajak warganya untuk turut berperan serta.

Apakah dalam mencapai hasil tersebut telah sesuai dengan prosedur, sudah berjalan dengan prosedur-prosedur yang ada, dalam suatu kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat sudah di rapatkan antara Ketua RT dengan masyarakatnya, sehingga dalam melakukan suatu kegiatan berjalan dengan baik.

Pendekatan yang dilakukan oleh Ketua RT adalah pendekatan yang memberi arahan kepada warga. Selain itu, pendekatan yang dilakukan oleh Ketua RT diantaranya melakukan observasi atau pengamatan di tempat adalah pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan secara langsung oleh Ketua RT terhadap warganya, untuk mendata warga yang belum memiliki KTP dan Kartu Keluarga dan dilakukan secara obyektif. Kegiatan pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesungguhan seorang Ketua RT memberi arahan kepada masyarakat, dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Untuk melaksanakan observasi tersebut, Ketua RT dibantu oleh masyarakat setempat yang merupakan anggota tim pelaksana observasi tersebut. Observasi langsung yang dilaksanakan oleh Ketua RT dalam satu minggu sekali.

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan Ketua RT di atas berupa pendekatan kognitif diyakini bahwa orang termotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu, banyak tergantung pada pikiran mereka. Proses kognisi ini dianggap sebagai proses pengolahan informasi. Informasi dimaksud adalah stimulus yang ditangkap oleh indera kemudian diproses dalam arti ditransformasi, direduksi, dan direkonstruksi untuk dapat dimanfaatkan. Proses tadi bukanlah merupakan suatu mata rantai antara stimulus dengan pikiran yang secara mekanistik dapat menimbulkan dan mengontrol perilaku. Stimulus sebagai sumber informasi dapat mempengaruhi atau mengontrol perilaku tergantung hal tersebut mempunyai arti atau tidak menurut keyakinan dan perasaan individu setelah berlangsungnya proses kognisi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Dalam hal ini yaitu merupakan kemampuan ketua RT dalam mengevaluasi program-program yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk memberikan arahan-arahan kepada masyarakat yang disertai dengan adanya Tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Pendekatan dilakukan secara obyektif, karena tidak mustahil ditemukan pula hal-hal yang positif berupa keberhasilan, kreativitas dan inisiatif. Hal-hal positif ini pun harus dikemukakan secara jujur. Untuk itu setiap Ketua RT harus memiliki kemampuan membandingkan temuannya dengan tolak ukur mengenai kegiatan yang dipantau, diperiksa dan dievaluasi. Termasuk juga dengan melihat relevansi pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini pendekatan akuntabilitas dapat dilihat melalui manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya berupa

output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang outcome. Akuntabilitas manfaat hampir sama dengan akuntabilitas program.

Hasil pendekatan tidak akan ada artinya tanpa kerja sama. Sehubungan dengan itu, tindak lanjut dapat berupa diberlakukannya kegiatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka memperbaiki kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan. Tindak lanjut itu bahkan tidak mustahil berupa penyimpangan pujian dan penghargaan terhadap warga yang berprestasi, sedangkan tindak lanjut lainnya terutama berkenaan dengan pemberian peringatan, sanksi dan hukuman.

Kegiatan Ketua RT/RW sudah menjadi budaya kesepakatan warga, untuk menjalin hidup bersama, menjalin kepentingan bersama, dan menanggung beban dan resiko bersama, selain itu karena kedekatannya dengan warga, Ketua RT/RW semestinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas dan strategis seperti menjaring aspirasi warga, mendeteksi permasalahan sosial secara dini (misalnya kasus narkoba, flu burung, gizi buruk dan isu kesehatan lainnya, bahkan ada kemungkinan lingkungan RT/RW dijadikan sebagai sarang teroris) serta menciptakan iklim yang kondusif dalam pelaksanaan pemilihan langsung (PEMILU) baik pemilihan kepala daerah maupun anggota legislatif.

Demokratis Partisipatif

Demokrasi partisipatif adalah pengambilan keputusan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang baik politik, ekonomi dan sosial. Menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan public interest dalam dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal perencanaan. Peran serta masyarakat dengan keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan (dalam perencanaan) atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat

Demokratis Partisipatif yaitu demokratis cenderung bermoral tinggi dapat bekerjasama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri. Partisipatif lebih banyak mendesentralisasikan wewenang yang dimilikinya sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak, berarti melibatkan anggota tim dalam pembuatan keputusan. Hal ini terutama penting manakala pemikiran kreatif diperlukan untuk memecahkan masalah yang kompleks atau membuat keputusan yang akan berdampak pada anggota tim.

Dalam hal ini bentuk penyampaian Ketua RT mengikut sertakan masyarakatnya dalam pengambilan keputusan, mendorong masyarakatnya dalam berpartisipasi serta menentukan metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai.

Ketua RT melakukan Laporan Di Tempat dan menyampaikan kepada bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan. Dimana dalam hal ini bawahan secara langsung menyampaikan berbagai kegiatan yang sedang dilaksanakan dan bagaimana hasil-hasil yang telah dicapai dari pekerjaan tersebut. Sehingga dengan adanya laporan tersebut Ketua RT dapat mengetahui berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakatnya, dan kegiatan apa saja yang belum terlaksana.

Selain itu laporan di tempat ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi kedepan bagi pemerintah Kecamatan, untuk dapat lebih meningkatkan kinerja mereka agar lebih baik lagi dari pada sebelumnya.

Oleh karena itu laporan di tempat ini merupakan salah satu bagian dalam proses pendekatan secara langsung, yang dilakukan oleh Ketua RT dalam sebuah kegiatan yang ada di lingkungan masyarakatnya.

Beberapa prinsip dasar dari demokrasi partisipasi, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Ajakan berpartisipasi disosialisasikan.
2. Tujuan dari demokrasi partisipasi senantiasa diuraikan se jelas mungkin pada tahap awal.
3. Akses terhadap seluruh dokumen dan berbagai informasi terkait yang menjadi agenda pembahasan dan pengelolaan pembangunan harus terbuka secara transparan.
4. Semua pihak mempunyai fungsi sebagai pengambil keputusan.
5. Setiap pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan pembangunan harus memiliki hak yang seimbang untuk menyalurkan aspirasinya pada tingkatan proses pengambilan keputusan.

Keterbukaan (Transparansi)

Keterbukaan (Transparansi) adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Adapun bentuk Transparansi ketua RT adalah senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat serta mengadakan Dialog-dialog terbuka kepada masyarakat.

Ketua RT memberikan suatu informasi yang bersifat publik kepada Kepala Desa bahkan kepada warganya mengenai anggaran yang dipakai untuk melakukan kegiatan gotong-royong dimana Ketua RT berkoordinasi secara langsung kepada Kepala Desa mengenai sarana-prasarana apa saja yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya kegiatan gotong-royong, bahkan untuk memenuhi keperluan konsumsi bagi warga yang melakukan kegiatan

gotong-royong. Dalam hal ini anggaran yang digunakan untuk kegiatan gotong-royong langsung dari kas Desa.

Empat unsur utama dikatakan pemerintahan terbuka /transparan, yaitu :

1. Pemerintah menyediakan berbagai informasi mengenai kebijakan yang ditempuhnya.
2. Masyarakat dan media massa memiliki kesempatan luas untuk mengetahui isi berbagai dokumen pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui parlemen).
3. Terbukanya sidang pemerintah bagi masyarakat dan media massa, menyangkut sidang eksekutif, legislatif, komisi-komisi dan pemda dan notulen hasil rapat-rapat.
4. Adanya konsultasi publik yang dilakukan pemerintah secara berencana.

Kegiatan Ketua RT/RW sudah menjadi budaya kesepakatan warga, untuk menjalin hidup bersama, menjalin kepentingan bersama, dan menanggung beban dan resiko bersama, selain itu karena kedekatannya dengan warga, Ketua RT/RW semestinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas dan strategis seperti menjangkau aspirasi warga, mendeteksi permasalahan sosial secara dini (misalnya kasus narkoba, flu burung, gizi buruk dan isu kesehatan lainnya, bahkan ada kemungkinan lingkungan RT/RW dijadikan sebagai sarang teroris) serta menciptakan iklim yang kondusif dalam pelaksanaan pemilihan langsung (PEMILU) baik pemilihan kepala daerah maupun anggota legislatif.

Kepemimpinan mempunyai dua pengertian, yaitu pemimpin dan kepemimpinan itu sendiri. Pimpinan adalah orang yang memimpin, umumnya pada kelompok yang lebih dari dua orang (organisasi), dan kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan dan kemampuan dari aktivitas seseorang dalam mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan dan tingkah laku orang lain untuk satu tujuan bersama.

Walaupun demikian, meski selama ini para ketua RT dan RW bekerja tanpa honor sekalipun, mereka dengan ikhlas tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga tanpa ada bantuan dana dari Pemerintah pun sesungguhnya tidak akan pernah mengganggu keberada.

5.1. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, maka berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu. Berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketua RT melakukan komunikasi secara langsung kepada Kepala Desa dan warganya dalam setiap kegiatan yang ingin dilakukan, setelah terlaksana

kegiatan tersebut Ketua RT memberikan suatu motivasi dan dorongan prestasi kepada warga dan Kepala Desa secara optimal dan efisien bahkan melakukan suatu kontrol terhadap kegiatan tersebut dan mampu bertanggung jawab, karna hal ini telah dimusyawarahkan sebelumnya dan telah ditemukan kesepakatan bersama dan telah di setuju dalam musyawarah, karna Ketua RT sebelumnya telah meberitahukan mengenai informasi-informasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu sebagian besar yang dilakukan berhubungan dengan sifatnya yang tradisional, misalnya kegiatan gotong-royong dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Pius dan Trisno Yuwono. 1994. Kamus Kecil Bahasa Indonesia, Surabaya : Arkola.

Arikunto, 2005, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V Cetakan Keduabelas, Bandung Rineka Cipta.

Beetham, David and Kevin Byle. 2000. Community Empowerment and Poverty Efforts Liberation, University of Chicago. USA.

Blau and Meyer. 2001. Public Participation in Environmental Management, Manchester University Press. England.

Bouman.1982. Rural Development and Non-Governmental Organizations, Jakarta Manchester University Press. England.

Candis Paul. 2001. Manajemen Perilaku Organisasi, Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Penerjemah : Agus Dharma Jakarta: Penerbit Erlangga.

Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Durkheim, Emile. 1988. Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan, Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Internet:

<http://www.maziatul.com/2010/03/konflik-peran-role-conflict.html>

<http://blog.re.or.id/pengertian-sistem-informasi.htm>

http://eprints.undip.ac.id/17986/1/JOHANNA_MUDJIATI.pdf

<http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/06/pengertian-sistem-informasi-manajemen.html>

http://www.inovasi.net/index.php?file_id=20&class=news&act=read&news_id=43